**SCRIPTA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA**
**Vol.7. No. 3 Juli – September, 2025**
**Hal. 103 - 110**
https://doi.org/10.33019/h5daec43
**ISSN: 2656-9809 (Online)**
https://scripta.ubb.ac.id/index.php/scripta/en

# GERAKAN KEADILAN EKOLOGIS WALHI DALAM MENGADVOKASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH (RTRW) DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

*Riris Fitriana*
Universitas Bangka Belitung
Email: Ririsbew71@gmail.com
*Bahjatul Murtasidin*
Universitas Bangka Belitung
Email: bahjatul@ubb.ac.id
*Tiara Elgi Fienda*
Universitas Bangka Belitung
Email: ratiara2018@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini berjudul "Gerakan Keadilan Ekologis WALHI dalam Mengadvokasi Kebijakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di Kepulauan Bangka Belitung". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam melakukan advokasi kebijakan RTRW yang berkeadilan ekologis di Kepulauan Bangka Belitung. Latar belakang penelitian ini berfokus pada isu keadilan ekologis yang menekankan hak makhluk hidup, termasuk manusia dan ekosistem, untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan yang layak. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekstraktif, seperti pertambangan dan perkebunan monokultur, menjadi tantangan serius yang dihadapi masyarakat lokal. WALHI berperan aktif dalam advokasi untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat dan lingkungan, serta mengatasi ketimpangan yang terjadi akibat relasi bisnis antara penguasa dan perusahaan. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori Deep Ecology oleh Arne Naess**,** yang menekankan kesetaraan hak antara manusia dan alam serta pentingnya aksi kolektif dalam pelestarian lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa WALHI melakukan berbagai upaya advokasi, termasuk pendampingan masyarakat, pendidikan publik, dan mobilisasi massa untuk menolak aktivitas yang merusak lingkungan. Selain itu, WALHI juga berfokus pada pengakuan hak masyarakat adat dan perlindungan terhadap ekosistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi WALHI berhasil mendorong penetapan Belitung sebagai zona pariwisata dan zona tangkap nelayan, serta zona zero tambang, yang memberikan dampak positif bagi keberlanjutan sumber daya laut dan ekonomi masyarakat lokal.

***Kata kunci: Gerakan Sosial, Keadilan ekologis, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia(WALHI)***

***Abstract***

*This research is titled "WALHI's Ecological Justice Advocacy in the Formulation of Regional Spatial Planning (RTRW) Policies in Bangka Belitung". The purpose of this research is to promote environmentally spatial planning laws in Bangka Belitung. This study's focus is on the concept of ecological justice, which highlights the rights of all living things including ecosystems and humans to be protected and have their rights to a decent environment fulfilled. One major issue facing local people is environmental harm brought on by extractive industries like mining and monoculture plants. In addition to tackling the inequity brought about by the commercial interactions between governments and corporations, WALHI actively advocates for policies that are more ecologically friendly and pro-community. The Deep Ecology theory of Arne Naess, which emphasizes the equality of human and natural rights and the value of group action in environmental conservation, was used to assess this study. Descriptive qualitative research methodology was employed, and data was gathered by observation, interviews, and documentation. According to this study, the indonesian forum for the Environment and Forestry, or WALHI, engaged in a number of advocacy initiatives, such as mass mobilization, public education, and community support, to oppose environmental harm. WALHI also prioritized ecological protection and acknowledging the rights of indigenous peoples. According to the research's findings, WALHI's campaigning was successful in getting Belitung designated as a zero-mining and tourism and fishing zone, which has benefited the local econony and the sustainability of marine resources.*

***Keywords: social movement, Ecological justice, indonesian Forum for the Environment (WALHI)***

## PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan hidup merupakan sebuah krisis multidimensi yang menjadi pembahasan serius dengan negara-negara yang ada di dunia. Salah satu permasalahan lingkungan hidup dan kerusakan alam sedikit banyaknya disebabkan oleh aktivitas manusia yang mengarah pada ekstraksi sumberdaya alam atau sering dikenal dengan ekstraktivisme. Ekstraktivisme merupakan konsep pembangunan ekonomi berbasis perusahaan yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumberdaya alam (Soe'oed, 2024). Sektor ekstraktif diantaranya seperti pertambangan, perkebunan monokultur dan kawasan industri.

Secara jangka pendek, kerusakan akibat sektor ekstraktif lebih berfokus pada ancaman penurunan ekosistem dan pengabaian terhadap hak masyarakat. Dikatakan demikian karena sektor ekstraktif telah banyak menghilangkan ruang hidup masyarakat di sekitar tapak-tapak perusahaan. Secara jangka panjang, sektor ekstraktif menyebabkan berbagai bencana ekologis seperti banjir, cuaca ekstrim, kegagalan panen pada sektor perkebunan dan perubahan musim yang tidak teratur. Begitupula, ekstraktivisme telah menjadi faktor

penyebab utama dari krisis iklim. Dampak ini akan menjadi ancaman dalam jangka panjang dalam keberlangsungan hidup masyarakat khususnya untuk generasi mendatang.
Melihat berbagai ancaman bencana ekologis akibat ekstraktivisme, terdapat salah satu organisasi yang berfokus pada kajian lingkungan hidup yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau disingkat WALHI. WALHI merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia. WALHI bekerja untuk terus mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup, dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab Negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat. Tak hanya sekedar itu WALHI melihat kerusakan lingkungan menjadi penyebab utama terjadinya ketimpangan sosial di masyarakat akibat banyaknya perampasan ruang oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif.

WALHI adalah organisasi yang bergerak dalam lingkungan hidup terbesar di Indonesia. Perlu dipertegas, WALHI merupakan lembaga organisasi independen atau *Non Government Organization* yang berfokus pada advokasi dan bukan lembaga konservasi. Melihat berbagai kritikan masyarakat terdampak di berbagai wilayah, WALHI Kepulauan Bangka Belitung sebagai Lembaga independen yang memperjuangkan pemulihan ekosistem melihat bahwa perlu untuk dilakukan dorongan terhadap pembentukan kebijakan pro-masyarakat dan perlindungan terhadap masyarakat adat. WALHI juga berfokus pada isu ketidakadilan ruang diakibatkan oleh aktivitas ekstraktif di Kepulauan Bangka Belitung.

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh WALHI diantaranya pendampingan masyarakat menghadapi ancaman dari perusahaan ekstraktif, advokasi dan mobilisasi massa. Perlu diketahui, umumnya Bangka Belitung dihadapkan dengan 2 sektor ekstraktif besar. Pertama, pertambangan mulai dari pertambangan timah dan pasir laut. Sedangkan perkebunan Monokultur diantaranya perusahaan Kelapa Sawit Raksasa dan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI). Hutan Tanaman Industri yang dikelola langsung oleh PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS) dan sudah sangat meresahkan masyarakat khususnya di 39 desa yang berada di Kabupaten Bangka Barat terkena atau terdampak langsung dari konsesi HTI yang akan ditanami pohon Akasia. Dari luas konsesi perusahaan 66.460 hektar, sekitar 75% lahan tersebut merupakan lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat untuk perkebunan seperti lada, karet, buah-buahan dan tanaman tumpang sari lainnya.

WALHI melakukan pendampingan dan pengadvokasian terhadap masyarakat nelayan dari hadirnya Punton Isap Produksi (PIP) di Desa Batu Beriga. WALHI bersama-sama dengan masyarakat nelayan melakukan aksi di PT Timah dan mendorong PJ Gubernur Bangka Belitung agar mengeluarkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM). WALHI melihat bahwa PT Timah dirasa sangat memaksakan kehendak untuk tetap melakukan aktivitas penambangan laut. Diantara beberapa kasus tersebut, WALHI selalu berfokus pada pusaran aturan yang banyak mengkerdilkan ruang hidup masyarakat. Hal ini menjadi landasan awal WALHI untuk mendorong Rencana Perda RTRWP yang Baru atau Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi yang berkeadilan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dalam kajian tentang Gerakan Keadilan Ekologis WALHI. penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mendapatkan serta menggali data bersifat kualitatif deskriptif digunakan untuk memperdalam analisis penelitian terkait persoalan aktivisme lingkungan yang dilakukan oleh WALHI dalam Gerakan Keadilan Ekologis. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di kepulauan Bangka Belitung, khususnya yang terfokus dalam lembaga WALHI. Objek penelitian adalah WALHI.

Teknik pemilihan subjek dilakukan *Purposive sampling*, yaitu pemilihan informan yang dianggap paling relevan dan memiliki informasi yang terkait fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua sumber data diantaranya: *Pertama*, data primer yaitu data terhadap objek yang diteliti secara langsung dengan mengumpulkan data secara langsung dengan melakukan wawancara mendalam dengan WALHI. *Kedua*, data sekunder berupa analisis dokumen melalui studi pustaka, buku, jurnal dan artikel dan tidak langsung memberikan data kepada peneliti.

Teknik analisis data yang diterapkan dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016) data hasil penelitian tersebut akan dianalisis menggunakan tiga komponen Display Data proses memilih dan memilah data mentah yang didapatkan dari lokasi penelitian berupa wawanacara, observasi serta dokumentasi kemudian dikelompokkan dalam pokok-pokok persoalan. Reduksi Data dapat berupa tabel, matrik, grafik dan lain sebagainya untuk memeprmudah peneliti dalam memahami data yang diperlukan dalam penelitian. Penarikan

Kesimpulan dalam tahap ini penarikan kesimpulan kemudian digunakan untuk merangkum data secara tajam agar relevan dengan teori yang dipakai dan sesuai dengan fokus penelitian yang dikaji sehingga akhirnya peneliti mampu menjawab rumusan masalah mengenai gerakan keadilan ekologi oleh WALHI Kepulauan Bangka Belitung mendorong RTRW yang berkeadilan ekologis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Advokasi WALHI Mendorong RTRW Berkeadilan Ekologis di Bangka Belitung

Keberpihakan Gerakan WALHI Terhadap Kebijakan RZWP3K

WALHI mengadvokasi kebijakan negara yang berpihak pada masyarakat sipil, adat, marginal, nelayan, dan petani, menentang pemberian izin konsesi besar yang merusak lingkungan dan mempersempit akses rakyat terhadap sumber daya. WALHI Bangka Belitung menjadi aktor utama dalam mendorong perubahan RTRW yang berkeadilan ekologis sebagai respons terhadap eksploitasi tambang timah. Fokus desakan WALHI adalah perlindungan kawasan ekologis penting (pesisir dan laut) dari pertambangan, menuntut penetapan zona "Zero Tambang" di wilayah seperti Batu Beriga. Perjuangan WALHI berlangsung sistematis melalui advokasi, aksi massa, dan dialog formal dengan DPRD dan pemerintah provinsi, menuntut transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan RTRW.

WALHI mengkritisi pengesahan Perda RZWP3K pada 2020 yang belum mengakomodasi kepentingan rakyat, dan terus mengawal revisi RTRW pada 2023-2025, termasuk desakan pencabutan IUP PT Timah di pesisir Batu Beriga. Keberhasilan advokasi WALHI di Belitung dalam menetapkan zona pariwisata, zona tangkap nelayan, dan zona zero tambang menunjukkan pentingnya kolaborasi masyarakat, pemerintah daerah, dan organisasi lingkungan. Tantangan advokasi meliputi ketimpangan kekuasaan antara masyarakat sipil dan korporasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta intimidasi terhadap aktivis. WALHI aktif mengajukan peninjauan kembali (review) terhadap daerah konflik pertambangan, memastikan RTRW adil bagi masyarakat Bangka Belitung yang aksesnya terhadap sumber daya semakin berkurang akibat ekstraktivisme.

WALHI mendesak restorasi kerusakan lingkungan, pencabutan izin HTI PT BRS, penghentian penambangan laut di Batu Beriga, dan pertanggungjawaban industri timah/elektronik. Keadilan ekologis bagi WALHI adalah keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan, dengan distribusi manfaat dan beban yang adil. Gerakan keadilan ekologis di Bangka Belitung dipelopori oleh masyarakat adat dengan

kearifan lokal. WALHI menghubungkan advokasinya dengan nilai-nilai budaya ini melalui pengorganisasian kampung, riset partisipatif, dan pemetaan wilayah.

**Analisis Advokasi WALHI sebagai Gerakan Berkeadilan Ekologis di Kepulauan Bangka Belitung**

Hampir 1 juta hektar lahan di Bangka Belitung dikuasai IUP timah, menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir, degradasi padang lamun, terumbu karang, mangrove, serta ribuan lubang tambang. Ini memicu konflik agraria dan sosial. Perjuangan WALHI merepresentasikan New Social Movement yang fokus pada keadilan ekologis, mengorganisir masyarakat terdampak, membangun kesadaran kritis, dan mendorong partisipasi publik dalam perumusan RTRW.

Fokus Isu Advokasi WALHI

Pendampingan masyarakat terdampak (nelayan Batu Beriga, Pangkalniur, Teluk Kelabat Dalam) melalui advokasi hukum, edukasi, dan mobilisasi massa. terhadap ekspansi kelapa sawit dan HTI (PT BRS, PT Foresta Dwikarya) yang menyebabkan perampasan lahan dan kerusakan ekologis, terlibat aktif dalam penyusunan dan evaluasi RTRW/RZWP3K, mendorong kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan. Pemetaan partisipatif wilayah adat, dukungan penguatan kelembagaan, dan dorongan pengakuan hukum. Melalui pelatihan dan diskusi untuk membangun masyarakat kritis dan mandiri. Mengumpulkan data dampak ekstraktif sebagai dasar advokasi. Mengawal legislasi, memberikan masukan, dan membangun koalisi.

Dinamika Relasi dengan Stakeholder

Dinas Lingkungan Hidup (DLHK): WALHI mengkritisi tumpang tindih zona pertambangan dengan perikanan dalam RZWP3K, menyoroti pengelolaan limbah tailing, dan mendorong pengawasan ketat. DLHK mengakui tantangan implementasi RZWP3K. Masyarakat Desa Beriga: WALHI melakukan sosialisasi dan diskusi publik, termasuk "rembuk kampung," untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak tambang laut. Ini memperkuat keberanian masyarakat menolak rencana pertambangan dan mempertahankan kearifan lokal. Organisasi Kepemudaan (GMNI) WALHI berkolaborasi dengan organisasi kepemudaan melalui diskusi, bedah film dokumenter, dan turun ke lapangan (misalnya Desa Batu Beriga). Koalisi ini bertujuan menggalang dukungan publik dan mengkampanyekan isu krisis iklim serta isu lokal. Tantangan terbesar adalah kekuatan massa dan dukungan publik yang terbatas

**SIMPULAN DAN SARAN**

**Simpulan**

WALHI berperan krusial dalam memperjuangkan keadilan ekologis di Kepulauan Bangka Belitung melalui advokasi kebijakan RTRW. Upaya WALHI meliputi pendampingan masyarakat, pendidikan publik, dan mobilisasi massa untuk menolak aktivitas ekstraktif yang merusak lingkungan dan merampas hak-hak masyarakat lokal serta adat. Advokasi WALHI berfokus pada pengakuan hak masyarakat adat, perlindungan ekosistem, dan mendorong kebijakan RTRW yang adil, transparan, serta menghentikan perampasan ruang hidup. Keberhasilan WALHI dalam menetapkan Belitung sebagai zona pariwisata, zona tangkap nelayan, dan zona zero tambang menunjukkan dampak positif advokasi mereka.

**Saran**

Pemerintah daerah dan pusat perlu memperkuat regulasi pengelolaan sumber daya alam, khususnya pertambangan, untuk mencegah kerusakan lingkungan dan melindungi masyarakat. Penegakan hukum yang tegas harus menjadi prioritas. Dukungan publik yang luas sangat dibutuhkan untuk memperkuat advokasi. Edukasi dan sosialisasi intensif kepada masyarakat diperlukan agar mereka memahami pentingnya keadilan ekologis dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan advokasi. Pengakuan resmi terhadap hak-hak masyarakat adat dan pemberdayaan komunitas lokal harus menjadi bagian integral dari kebijakan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah perlu mengakomodasi kearifan lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program lingkungan.

## TENTANG PENULIS

Penulis bernama Riris Fitriana mahasiswa Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Bangka Belitung Angkatan 2021. Penulis merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara yang lahir pada tanggal 19 Desember 2001 beralamat di Desa Sekar Biru Kecamatan ParitTiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penulis merupakan alumni SMK 1 ParitTiga.

## DAFTAR PUSTAKA

Fajar, M. A., Sood, M., & Dewanto, P. A. (n.d.). *Analisis peran dan strategi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam advokasi lingkungan hidup di Indonesia*. Universitas Mataram.

Wahyudi, H., Anugerah, M. F., & Arif, M. (2021). Keterlibatan WALHI dalam Politik Lingkungan Hidup terhadap Kasus Kabut Asap di Riau. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, *4*(2), 44–61. https://doi.org/10.36341/jdp.v4i2.1659

WALHI Bangka Belitung. (n.d.). *WALHI Bangka Belitung*. Retrieved July 10, 2025, from

https://walhibangkabelitung.blogspot.com/

Bangka Sonora. (2025). *WALHI Desak DPRD dan Pemprov Babel Percepat Restorasi Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Tambang Timah*. Diakses dari https://bangka.sonora.id/read/504220922/walhi-desak-dprd-dan-pemprov-babel-percepat-restorasi-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-timah/ Pada 5 Juli 2025

Bangka Tribun News. (2020). *Perda RZWP3K Disahkan DPRD Bangka Belitung, WALHI: Belum Bisa Mengakomodir Kepentingan Rakyat*. Diakses dari https://bangka.tribunnews.com/2020/02/28/perda-rzwp3k-disahkan-dprd-babel-walhi-belum-bisa-mengakomodir-kepentingan-rakyat/ Pada 5 Juli 2025

Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.